

**STUDI BENTUK IMPLEMENTASI DAN DAMPAK SOSIAL EKONOMI  
PENGELOLAAN HUTAN DESA DI NEGERI MORELLA,  
LEIHITU, MALUKU TENGAH  
(KASUS DI KUPS TOMASIWA DAN SILIWANGI)**

***STUDY OF THE IMPLEMENTATION FORMS AND SOCIO-ECONOMIC IMPACT  
OF VILLAGE FOREST MANAGEMENT FOR COMMUNITIES IN NEGERI  
MORELLA, LEIHITU, CENTRAL MALUKU  
( CASES IN KUPS TOMASIWA AND SILIWANGI )***

**Nur Rahma Salsabilah Umarella<sup>1\*</sup>, Iskar<sup>2</sup>, Wilma N Imlabla<sup>3</sup>**

*1,2,3 Program Studi Kehutanan, Fakultas Kehutanan Universitas Pattimura Ambon*

*Jalan. Ir. M. Putuhena, Kampus Poka – Ambon, 97233*

*\*Email Korespondensi: salsabila.umarella@gmail.com*

**ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui bentuk implementasi program Perhutanan Sosial dan dampak Sosial Ekonomi dalam pengelolaan Hutan Desa oleh LPHD di Negeri Morella. Penelitian ini menggunakan Metode purposive sampling yaitu LPHD, KUPS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat bentuk Implementasi program perhutanan sosial (PS) dengan skema pengelolaan Hutan Desa (HD) oleh LPHD di Negeri Morella diantaranya dibentuk KUPS (KUPS Siliwangi, KUPS Toma Siwa, dan KUPS Hausihu). Bentuk kegiatannya antara lain Program Agroforestry lewat penyuluhan dan penanaman bibit (durian, pala, cengkeh, dan lain-lain), perencanaan penyulingan minyak cengkeh, bantuan alat-alat produksi pengolahan sago serta penjangkakan bantuan kerjasama dengan Bank BI untuk kemasan dan pemasaran sago tumbu. Dampak sosial ekonomi keberadaan Hutan Desa (HD) antara lain ; Dampak Sosial yaitu dapat membangun kapasitas masyarakat dalam mengelola lahan, pemahaman responden terhadap HD, adanya interaksi sosial, Nilai dan norma budaya (gotong royong, kerjasama, berbagi pengalaman, kebersamaan), Dampak ekonomi yaitu pelatihan manajemen dan memanfaatkan hasil hutan, peningkatan ekonomi secara mandiri, peningkatan usaha ekonomi masyarakat, bantuan alat ekonomi/alat produksi, bantuan modal usaha, menambah pengetahuan dan ketrampilan dalam pemasaran produk, serta peluang usaha/wirausaha, dan kepastian pengelolaan hutan.

**Kata Kunci :** Lembaga Pengelola Hutan Desa, Kelompok Usaha Perhutanan Sosial, Agroforestry

**ABSTRACT**

*The purpose of this study was to determine the form of implementation of the Social Forestry program and the Socio-Economic impacts in the management of Village Forests by LPHD in Morella Village. This study used a purposive sampling method, namely LPHD, KUPS. The results of the study showed that there were forms of Implementation of the Social Forestry (PS) program with the Village Forest (HD) management scheme by LPHD in Morella Village, including the formation of KUPS (KUPS Siliwangi, KUPS Toma Siwa, and KUPS Hausihu). The forms of activities include the Agroforestry Program through counseling and planting of seedlings (durian, nutmeg, cloves, and others), planning for clove oil distillation, assistance with sago processing production tools and exploring cooperation assistance with Bank BI for packaging and marketing of sago tumbu. The socio-economic impacts of the existence of Village Forests (HD) include; Social Impacts, namely being able to build community capacity in managing land, respondents' understanding of HD, the existence of social interaction, Cultural values and norms (mutual cooperation, cooperation, sharing experiences, togetherness), Economic Impacts, namely management training and utilizing forest products, increasing the economy independently, increasing community economic efforts, assistance with economic tools/production tools, assistance with business capital, increasing knowledge and skills in product marketing, as well as business/entrepreneurship opportunities, and certainty of forest management.*

**Keywords :** Village Forest Management Institute, Social Forestry Business Group, Agroforestry

## PENDAHULUAN

Hutan merupakan sumber daya yang mempunyai kedudukan lebih strategis di kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga dalam pengelolaan hutan secara lestari memerlukan sumber daya manusia yang berkualitas, memiliki kemampuan Ilmu Pengetahuan dan teknologi, serta pengelolaan yang baik. Pemanfaatan sumber daya hutan dipengaruhi oleh beberapa factor antara lain tingkat pendidikan masyarakat dan angka kemiskinan masyarakat sekitar yang masih sangat tinggi (Sagita *et.al*, 2019 *dalam* Witno *et.al*, 2020). Dalam proses penerapan konsep pengelolaan hutan yang lestari, masyarakat sekitar hutan merupakan aktor utama yang sering berinteraksi dengan hutan (Sanjaya, 2016 *dalam* Witno *et.al*, 2020).

Peraturan MENLHK Nomor 83 Tahun 2016 pasal 1 ayat(1) tentang Perhutanan sosial yang mengatur pemanfaatan hutan. Perhutanan Sosial meliputi perhutanan berupa hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan milik masyarakat lokal atau adat sebagai pemangku kepentingan utama wilayah hutan nasional, atau hutan hak/adat untuk meningkatkan kesejahteraan, keseimbangan utama dalam kawasan hutan nasional atau hutan hak/adat meningkatkan kesejahteraan, keseimbangan lingkungan hidup, dan dinamika sosial budaya sistem pengelolaan yang diterapkan di hutan. Perkebunan rakyat, hutan rakyat, hutan adat, dan hutan kemitraan.

Pemerintah berupaya mengurangi garis kemiskinan masyarakat sekitar hutan akan berkurang dengan meningkatkan pembagian lahan milik kelompok tani dari 1,7 juta hektar menjadi 12,7 juta Hektar (30%). Masyarakat dapat memperoleh kepemilikan atas 1 -2 hektar per rumah tangga di pulau Jawa dan 4-5 hektar di luar pulau Jawa dalam program perhutanan sosial (Supriyanto, 2018) *dalam* Kastanya, dkk (2019). Tujuan dari Peningkatan partisipasi dalam organisasi kemasyarakatan adalah untuk meningkatkan peluang perekonomian masyarakat berdasarkan prinsip pemerataan dan keberlanjutan.

Tujuan perhutanan sosial adalah untuk menyeimbangkan zona perekonomian masyarakat dan mengurangi kesenjangan dalam zona perekonomian, berdasarkan tiga pilar : lahan, penyediaan peluang usaha, dan sumber daya manusia. Program tersebut kemungkinan masyarakat pedesaan di sekitar hutan untuk mengakses hutan di kawasan hutan nasional secara legal melalui proses perizinan yang dikeluarkan Menteri dalam bentuk Surat Keputusan (SK). Selain itu, maksud pengembangan perhutanan sosial adalah untuk melibatkan mereka dalam sumber daya hutan yang ada.

Dampak penerapan Perhutanan Sosial (PS) diberbagai wilayah di Indonesia telah menciptakan teladan yang sangat efektif dalam mengembangkan program PS lebih lanjut. Keberhasilan pengembangan KUPS meliputi peningkatan teknologi pascapanen, pola panen, keuntungan perekonomian, dan akses pasar seperti produk HHBK : kayu, ekowisata dan produk

perhutanan sosial seperti Madu, Sagu, Kopi, Rotan, Karet, Aren, Coklat, Lada, Kemiri, Kayu Manis, Biji Pala, Tengkawang, dan lain-lain dibuat sesuai keterampilan serta ciri khas kelompok tani setempat.

Berdasarkan data dari pihak BPSKL Maluku Papua bahwa jumlah kelompok perhutanan sosial yang mendapatkan surat keputusan (SK) persetujuan di Maluku ada 138, dengan perician Hutan Desa (HD) ada 73 ijin, Hutan Kemasyarakatan (HKm) ada 54 ijin, HTR ada 2 ijin dan Hutan Adat (HA) ada 4 ijin. Adapun bentuk skema yang mendapatkan persetujuan di Negeri Morella adalah skema Hutan desa.

Hutan nasional dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa. Salah satu bentuk kegiatannya adalah melalui program pemberdayaan masyarakat setempat tujuannya untuk meningkatkan kapasitas dan kemandirian masyarakat untuk memperoleh manfaat yang optimal dan adil dari sumber daya hutan melalui peningkatan kapasitas dan akses terhadap pengelolaan.

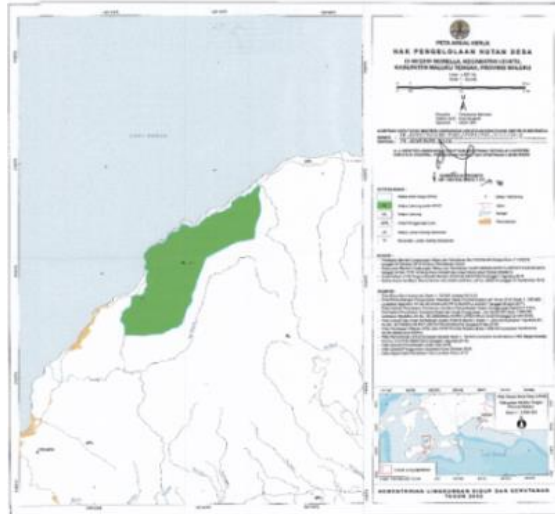
Pengelolaan Hutan Desa peran dari masyarakat sangat penting, khususnya Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS). Untuk itu keikutsertaan anggota setiap kelompok tani sangat diperlukan dalam segala aktivitas yang dilakukan oleh kelompok tani agar mampu meningkatkan sasaran yang ingin dicapai yaitu aspek pengelolaan area, pengelolaan organisasi dan kelola usaha dalam setiap aktivitas yang dilakukan, dengan adanya partisipasi anggota dari setiap kelompok tani, dapat dilihat bagaimana dinamika yang terbentuk dalam suatu kelompok tani tersebut di dalam mengikuti kegiatan-kegiatan atau mengikuti program perhutanan sosial yang dilakukan. Dengan kata lain, partisipasi anggota kelompok tani yang baik dan dinamika intra kelompok mempengaruhi tata kelola regional, organisasi dan bisnis grup.

Pengalihan Kewenangan Pengelolaan Hutan Desa (HPHD) kepada Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) Negeri Morella berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK. 8290/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/11/2018 tanggal 29 bulan Nopember tahun 2018 tentang Pemberian Hak Pengelolaan Hutan Desa (HPHD) pada LPHD Negeri Morella seluas  $\pm$  927 Ha yang berada pada kawasan Hutan Lindung. Pada saat itu pengelolaan Hutan telah melibatkan masyarakat secara langsung dalam pengelolaan hutan. Sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat, dibentuklah kelompok usaha tani hutan. Untuk itu penelitian sangat penting mengetahui bentuk implementasi program Perhutanan Sosial dalam pengelolaan Hutan Desa oleh LPHD di Negeri Morella.

## METODE PENELITIAN

### Lokasi dan Waktu Penelitian

Riset dilaksanakan di Desa Morella, Kecamatan Leihitu. Waktu pelaksanaan riset pada bulan Februari sampai Maret 2023.



Gambar 1. Lokasi Penelitian (KLHK, 2018)

### Metode Penentuan Sampel

Riset ini menggunakan riset kualitatif dan kuantitatif dengan prosedur ialah prosedur survey dimana data diperoleh cara interviu dan pengisian daftar pertanyaan, pengamatan langsung dan kepustakaan.

*Purposive sampling (sampel bertujuan)* berupa pengambilan sampel bersumber pada kriteria /karakteristik penduduk yang ditentukan sebelumnya. Dalam riset ini populasi sampelnya yaitu kelompok Desa Morella yang terlibat langsung pada Lembaga Pengelolaan Hutan Desa (LPHD) khususnya Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) yaitu KUPS Tomasiwa dan KUPS Siliwangi berjumlah 30 orang. Sedangkan untuk memperkuat informasi yang telah didapatkan dari proses wawancara dengan anggota LPHD/KUPS, maka diwawancara juga informan kunci seperti BPSKL, pihak KPH, dan Pendamping Desa.

### Jenis Data

Jenis data yang digunakan riset adalah data asli (primer) dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari hasil wawancara dan tanggapan kuesioner masyarakat sekitar hutan, tokoh-tokoh adat, staf desa serta observasi langsung di lapangan. Data sekunder digunakan untuk melengkapi dan mendukung data primer yang diperoleh dari berbagai buku, artikel, skripsi terdahulu yang relevan, instansi terkait atau juga dengan menggunakan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian.

### Metode Pengumpulan Data

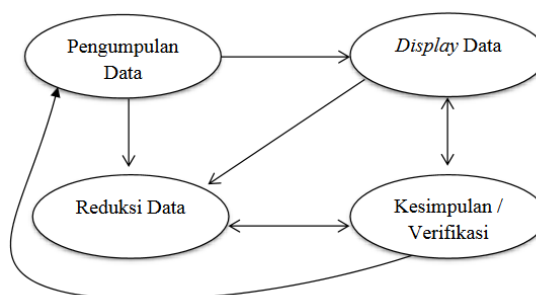
Pengumpulan data menggunakan cara sebagai berikut:

- a. *Interviu* menggunakan daftar pertanyaan (Kuisisioner).
- b. *Observasi* merupakan cara akumulasi data yang dilakukan mengadakan pengamatan secara langsung terhadap objek yang akan diteliti. Objek yang diteliti adalah Kelompok Usaha Perhutanan sosial (KUPS) Tomasiwa dan Siliwangi yang terlibat dalam Lembaga Pengelola Hutan Desa di Negeri Morella, Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah.
- c. *Studi literatur* metode dilakukan mengumpulkan data sekunder yang dibutuhkan peneliti.
- d. *Dokumentasi*. meneliti data/variabel berupa catatan, buku, notulen, rapat.

### Analisis Data

Pengolahan data dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan metode mengelompokkan maupun mengklasifikasikan data berdasarkan beberapa tema sesuai penelitiannya (Bagong, Suyanto dan Sutinah, 2006). Sedangkan Miles dan Huberman (1992) dalam Sugiyono (2018) menyatakan analisis terdiri dari tiga plot kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu : reduksi data, penyajian data dan pengambilan kesimpulan.

- a. *Reduksi Data*. merupakan proses seleksi yang berfokus dipenyederhanaan, penggalian dan tranformasi info mentah yang diperoleh dari evaluasi lapangan.
- b. *Penyajian data*. dilakukan dalam model table, grafik, diagram alur, diagram gambar dan lain-lain.
- c. *Menarik Kesimpulan*. aktivitas dari konfigurasi yang utuh. Merangkum verifikasi selama penelitian berlangsung.



Gambar 2. Komponen Dalam Analisis Data



## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Karakteristik Responden*

Responden di riset ini ialah kepala rumah tangga yang memanfaatkan dan mengelola hutan yang merupakan member Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) Hutan Desa (HD). Individual responden yang akan diuraikan dalam riset ini berhubungan dengan jenis kelamin, umur responden, jenjang pendidikan, jumlah tanggungan, pekerjaan dan pendapatan.

### *Karakteristik Responden katagori Jenis Kelamin*

Tabel 1. Karakteristik Responden Jenis Kelamin di Negeri Morella Tahun 2023

No	Jenis Kelamin	Jumlah (jiwa)	Prosentase (%)
1	Laki-laki	28	93,3
2	Perempuan	2	6,6
<b>Total</b>		<b>30</b>	<b>100</b>

*Sumber : Data Primer Diolah, 2023*

Dari Tabel 1 memperjelas anggota KUPS Hutan Desa (HD) ternyata didominasi oleh responden jenis kelamin Laki-laki yang berjumlah 28 orang, dengan presentasi sebesar 93.3%, sedangkan responden dengan jenis kelamin perempuan berjumlah 2 orang, dengan prosentase sebesar 6.6%. Hal ini disebabkan masyarakat yang banyak beraktifitas dalam pengelolaan hutan, dusung ataupun kebun umumnya adalah laki-laki sehingga keterlibatan di dalam anggota KUPS Hutan Desa juga relative tinggi.

### *Karkateristik Responden terkait Umur*

Tabel 2. Karakteristik Responden Kelompok Usia di Negeri Morella Tahun 2023

No	Kelompok Usia (Tahun)	Jumlah (jiwa)	Prosentase (%)
1	15 – 64 ( Produktif)	30	100
2	> 65 (Non Produktif)	0	0
<b>Total</b>		<b>30</b>	<b>100</b>

*Sumber : Data Primer Diolah, 2023*

Bersumber di Tabel 2. dijelaskan kelompok usia 15 – 64 tahun yang dikategorikan usia produktif menjadi dominan anggota KUPS, baik pada Tomasiwa maupun Siliwangi sebesar 100% atau berjumlah 30 orang. Dimana usia terendah adalah 21 Tahun berjumlah 1 orang.

### Karakteristik Responden Tingkat Pendidikan

Tabel 3. Karakteristik Responden Tingkat Pendidikan di Negeri Morella Tahun 2023

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (jiwa)	Prosentase (%)
1	Tidak Sekolah	2	6.6
2	SD	5	16.6
3	SMP	3	30
4	SMA	18	60
5	Sarjana (S1)	2	6.6
<b>Total</b>		<b>30</b>	<b>100</b>

Sumber : Data Primer Diolah, 2023

Bersumber pada Tabel 3. dijelaskan tingkat pendidikan responden tertinggi adalah Sarjana (S1) sebanyak 2 orang atau sekitar 6.6%, selanjutnya tingkat pendidikan yang paling dominan SMA berjumlah 18 orang atau sekitar 60%. Tingkat pendidikan yang terendah berjumlah 2 orang atau sekitar 6.6% tidak bersekolah.

### Karakteristik Responden Status Perkawinan

Tabel 4. Karakteristik Responden Katagori Status Perkawinan di Negeri Morella Tahun 2023

No	Status Perkawinan	Jumlah (jiwa)	Prosentase (%)
1	Menikah	29	96,6
2	Belum Menikah	1	3.3
<b>Total</b>		<b>30</b>	<b>100</b>

Sumber : Data Primer Diolah, 2023

Pada Tabel 4. dapat dijelaskan bahwa status perkawinan responden sudah menikah lebih mendominasi yaitu sebesar 96.6% atau berjumlah 29 orang. Selanjutnya yang belum 3.3% (satu orang). Hal ini berarti bahwa responden yang status perkawinannya sudah menikah dan memiliki anak, maka tanggungan untuk keluarga juga lebih besar jika dibandingkan dengan sudah menikah tetapi belum memiliki anak ataupun status perkawinan belum menikah, pasti besar tanggungan kemungkinan lebih kecil.

### Karakteristik Responden Jenis Pekerjaan

Tabel 5. Karakteristik Responden Jenis Pekerjaan di Negeri Morella Tahun 2023

No	Jenis pekerjaan	Jumlah (Jiwa)	Prosentasi (%)
1	Petani	26	86.6
2	Wiraswasta	2	6.6
3	Staf Negeri	2	6.6
<b>Total</b>		<b>30</b>	<b>100</b>

Sumber : Data Primer Diolah, 2023

Pada Tabel 5. disimpulkan pekerjaan responden yang memiliki prosentase tertinggi sebesar 86.6 % atau sebanyak 26 orang bekerja sebagai petani. Selanjutnya Pekerjaan responden paling sedikit yaitu wiraswasta dan staf negeri sebanyak 2 orang atau sekitar 6.6%. Hal ini sangat sesuai dengan program perhutanan sosial yang kelompok sasarannya untuk peningkatan ekonomi masyarakat dan aksesibilitas terhadap sumberdaya hutan ialah kelompok yang tergabung dalam kelompok tani hutan untuk melakukan pengelolaan hutan desa.

*Karakteristik Responden Jumlah Tanggungan*

Tabel 6. Karakteristik Responden Tanggungan Keluarga di Negeri Morella Tahun 2023

No	Tanggungan Keluarga (Orang)	Jumlah (Orang)	Prosentase (%)
1	Kecil ( < 3)	2	6.6
2	Sedang ( 3 – 5)	25	83.3
3	Besar ( > 5)	3	10
<b>Total</b>		<b>30</b>	<b>100</b>

Sumber: Data Primer, 2023

Pada Tabel 6, menjelaskan jumlah tanggungan keluarga di kelompokan dalam 3 kelompok yang didasarkan pada konsep catur warga yaitu keluarga kecil (jumlah tanggungan < 3 orang), keluarga sedang (jumlah tanggungan 3 – 5 oran) dan keluarga besar (jumlah tanggungan > 5 orang). Hasil penelitian menunjukkan responden terbanyak dengan jumlah 25 orang yang memiliki tanggungan keluarga katagori sedang (berkisar 3 – 5 orang) anggota atau 83.3%. Sedangkan paling kecil responden berjumlah 2 orang dengan jumlah tanggungan keluarga katagori kecil (berkisar < 3 orang) atau 6.6%.

*Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendapatan Di Negeri Morella Tahun 2023*

Tabel 7. Karakteristik Pendapatan Responden di Negeri Morella Tahun 2023

No	Pendapatan (Rp)	Jumlah (Jiwa)	Prosentasi (%)
1	500.000 s.d 1.000.000	18	60
2	1.000.000 s.d 3.000.000	12	40
<b>Total</b>		<b>30</b>	<b>100</b>

Sumber : Data Primer Diolah, 2023

Pada Tabel 7. menjelaskan pendapatan responden tertinggi ada pada kisaran Rp. 500.000 s.d 1.000.000, dengan jumlah 18 orang atau sekitar 60%, sedangkan pendapatan terendah ada pada kisaran 1.000.000 s.d 3.000.000 dengan jumlah responden sekitar 12 orang atau sekitar 40%.



Pendapatan responden diperoleh dari aktivitas atau pekerjaan sebagai petani (penghasilan dari berkebun, dusung), wirswasta dan staf negeri. Sedangkan pendapatan dari program perhutanan social lewat KUPS, hanya baru sebatas pemanfaatan modal usaha dan pelatihan-pelatihan pengembangan usaha.

### ***Bentuk Implementasi Program Perhutanan Sosial oleh LPHD***

Selain sistem pengelolaan hutan kemasyarakatan yang telah diatur pada undang-undang Indonesia, masih tinggi gaya manajemen hutan lain yang sebenarnya sudah lama dilakukan oleh beberapa kelompok masyarakat, termasuk masyarakat adat. Misalnya Maluku yang termasuk didalamnya Negeri Morella disebut *Dusung*. Penamaan dusung merupakan istilah yang diturunkan dari generasi ke generasi dalam manajemen lahan hutan. Sebab ini merupakan bagian dari budaya, dimana terdapat berbagai bentuk kearifan local untuk menjaga kelestarian pengelolaan hutan. Kebijaksanaan dapat berupa pengetahuan atau ide, norma adat, nilai budaya, aktivitas, dan peralatan sebagai hasil abstraksi mengelola lingkungan (Silaya, 2004; Suhartini, 2009).

Silaya (2004) bahwa warga Maluku mempunyai kearifan lokal maupun pengetahuan adat yang menampung kualitas, kaidah, aturan, dan tatanan yang digunakan. menggunakan dan mengatur sumberdaya alam untuk kehidupan berkelanjutan. Pengetahuan adat merupakan pembelajaran yang dikembangkan komunitas masyarakat selama berabad-abad. Pengetahuan adat dikembangkan berdasarkan pengalaman, diuji untuk penggunaan jangka panjang, disesuaikan dengan budaya dan lingkungan lokal(wilayah), dinamis dan berubah.

Pemanfaatan dan pengelolaan lahan dalam bercocok tanam masyarakat Negeri Morella, memiliki teknik dan bentuk pengelolaan dalam bentuk dusung yang merupakan pola Agroforestry tradisonal. Model ini dikenal dengan sebutan Agroforestri oleh banyak masyarakat lokal di Indonesia dan luar negeri, yaitu metode pemanfaatan lahan yang paling efisien dan berkelanjutan, dengan menggabungkan kehutanan dan pertanian dalam suatu bidang manajemen lahan yang sama, dengan memperhatikan kondisi lingkungan fisik, sosial, ekonomi, budaya dan peran serta masyarakat.

Agroforestri tradisional/dusung adalah salah satu jenis manajemen hutan yang dikembangkan oleh masyarakat di Negeri untuk mendiversifikasi produksi, menambah kebutuhan pangan yang dihasilkan untuk kebutuhan sendiri dari lahan tanaman semusim. Model tersebut merupakan dampak pengelolaan hutan tradisonal terus dikembangkan oleh masyarakat lokal melalui ide, investasi dan rancangan jangka panjang petani. Oleh karena itu, penentuan tanaman dan pola agroforestri dalam rangka pengembangan agroforestri akan sangat mempengaruhi kebutuhan masyarakat dan tujuan pengembangan program HD.

Bentuk-bentuk pengelolaan hutan/lahan, memiliki budidaya yang beragam pada tiap wilayah mencerminkan sebuah kultur, dan sangat erat hubungannya dengan kehidupan kelompok masyarakat adat yang hidup dan tinggal di kawasan sekitar hutan di seluruh wilayah Indonesia. Walaupun secara legal formal, bentuk-bentuk pengelolaan hutan jenis ini hingga sekarang masih didiskusikan ketersediaan payung hukumnya sebagai bagian penting dalam konteks pengelolaan hutan (Latukau, 2019).

Disamping itu, masyarakat lokal umumnya tinggal didalam mau pun disekitar hutan telah melakukan pengelolaan hutan sejak ratusan tahun yang lalu hingga saat ini secara turun temurun. Manajemen hutan tersebut berkaitan dengan kearifan, aturan dan mekanisme kelembagaan yang ada serta teruji menciptakan tertib pengelolaan, dan sistem pengelolaan yang berbasis masyarakat serta pemanfaatannya yang berdimensi jangka panjang. (Anonim, 2002 *dalam* Latukau ( 2019).

Keberadaan LPHD sangat membantu masyarakat, khususnya Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS). Bentuk Implementasi program pengelolaan Hutan Desa oleh LPHD adalah terbentuknya KUPS yang terdiri dari tiga (3) KUPS yakni KUPS Siliwangi, KUPS Toma Siwa, dan KUPS Hausihu.

Masyarakat mengetahui adanya program perhutanan sosial Hutan Desa (HD) dan mendapatkan manfaat dari HD ialah diharapkan meningkatnya kesejahteraan masyarakat disekitar kawasan PS. Implementasi perhutanan sosial itu sendiri terjadi pada desa Morella tahun 2019 setelah SK pada bulan November 2018 dikeluarkan. Perkenalan Perhutanan sosial pertama kali dari BPSKL dengan diikutsertakan masyarakat untuk ikut dalam program dari BPSKL.

Pada umumnya masyarakat/responden di Negeri Morella mengetahui manfaat dari Perhutanan sosial (PS) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan areal PS sehingga sangat merespon dengan baik ketika pihak BPSKL memfasilitasi untuk pembentukan HD. Implementasi PS dilakukan sejak tahun 2019, dan terhenti karena Covid-19 selama 3 tahun.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap LPHD dan informan kunci (pendamping Lapangan) HD di Negeri Morella, diperoleh bahwa bentuk implementasi program perhutanan sosial meliputi;

#### *Pembentukan KUPS dan LPHD*

Implementasi Hutan Desa (HD) di Negeri Morella mula dikelola oleh Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Wil. Maluku Papua yang memiliki misi kegiatan tersebut. Implementasi pelaksanaan selesai 2019 dibentuk tiga (3) komunitas kerja HD yaitu KUPS Pesona Siliwangi, KUPS Toma Siwa, dan KUPS Hausihu. Susunan kelompok awalnya terdiri dari 15 orang untuk KUPS Pesona Siliwangi, 16 orang untuk KUPS Toma Siwa dan untuk KUPS Hausihu tidak aktif. Anggota KUPS yang dibentuk berisi kepala keluarga dan anggota keluarga yang sudah dewasa termaksud perempuan yang bisa bekerja.

Dasar penciptaan tiga (3) kelompok HD ditetapkan pada Izin resmi Hutan Desa yang telah diberikan untuk Desa Morella setelah Pemberian Hak Pengelolaan Hutan Desa (HPHD) kepada Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) Negeri Morella berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK. 8290/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/11/2018 tanggal 29 bulan November tahun 2018.

Proses terbentuknya LPHD melalui mekanisme sesuai program yang dibutuhkan di Negeri Morella dan mendapat Surat Keputusan (SK) dari Kepala Pemerintahan Negeri Morella

#### *Program Agroforestry*

Bentuk pemanfaatan lahan/hutan dengan pola agroforestry atau yang sudah dilakukan oleh masyarakat di negeri Morella yaitu agroforestry tradisional yang dikenal dengan sistem/pola Dukung secara turun temurun. Bentuk inilah yang diusulkan pada saat sosialisasi perhutanan sosial di lakukan oleh BPSKL di Negeri Morella. Sedangkan jenis tanaman juga disesuaikan dengan potensi dan kebutuhan dari masyarakat yang sudah biasa di tanam di dukung. Adapun kegiatan yang telah di implementasikan seperti penyuluhan dan penanaman tanaman kayu-kayuan MPTS (seperti durian, cengkeh, pala dll), kepada masyarakat. Adapun anakan yang telah ditanam sekitar 5.000 anakan yang sudah ditanam di Negeri Morella oleh KUPS Silliwangi.

#### *Penyulingan Minyak Cengkeh*

Bentuk implementasi untuk kegiatan penyulingan minyak cengkih yang direncanakan akan dikelola dan diproduksi oleh KUPS Hausihu. Namun kegiatan produksinya belum jalan karena terkendala belum tersedia rumah produksi (Belum ada bantuannya).

#### *Bantuan Alat-alat Produksi*

Bentuk implementasi untuk alat-alat produksi yang telah diberikan bantuan yaitu berupa mesin pengolahan sagu. Bantuan alat produksi ini diberikan kepada KUPS Tomasiwa. Kegiatannya pengolahan sagu. Namun pada saat penelitian ini dilakukan dengan mewawancarai anggota KUPS Tomasiwa, peneliti tidak melihat hasil produksi olahan sagu tersebut oleh mesin pengolahan sagunya.

#### *Penjajakan bantuan kerjasama dengan Bank BI*

Bentuk implementasi yang selanjutnya direncanakan adalah mengenai pemasaran sagu tumbu yang akan di fasilitasi oleh bank BI berupa kemasan sagu tumbu. Kegiatan ini juga belum dapat dilaksanakan pada saat penelitian ini dilakukan.

## **Dampak Sosial Ekonomi Keberadaan Hutan Desa (HD)**

Dari Hasil riset yang dilakukan, dapat disimpulkan bagaimana pengelolaan HD memberikan pengaruh atau berdampak sosial ekonomi bagi masyarakat di Negeri Morella khususnya bagi KUPS sebagai berikut :

### **Dampak Sosial**

Hasil penelitian menjelaskan bahwa beberapa responden HD di Negeri Morella mengatakan bahwa program PS sosialisasi hingga implementasi program telah meningkatkan pemahaman masyarakat umum secara signifikan. Sehingga ada beberapa dampak secara sosial budaya yang dirasakan dan terlihat oleh masyarakat antara lain :

#### *Membangun kapasitas masyarakat dalam mengelola lahan*

Sebagian besar responden mengatakan bahwa penyuluhan yang diberikan telah membangun relasi dan telah terjadi beberapa interaksi antara Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Wil. Maluku Papuadengan anggota komunitas dalam sistem pengembangan keahlian kelompok tani dalam mengorganisir lahan. Interpretasi itu, lebih berpengaruh karena disertai praktek lapang yang langsung dilaksanakan oleh anggota komunitas sendiri dan mencapai hasil yang diinginkan secara bertahap. Selain itu antar kelompok dapat berbagi pengalaman dalam pemanfaatan dan pengelolaan hutan/lahan.

#### *Interaksi Sosial*

Interaksi sosial masyarakat/responden di Negeri Morella berjalan cukup baik, dimana relasi sosial yang terbangun dilandasi atas kesadaran bersama sebagai masyarakat adat dengan ikatan-ikatan sosial yang kuat sehingga hubungan kemasyarakatan tercipta dengan baik, bahkan tidak pernah terjadi masalah dalam pelaksanaan program PS dalam kelompok. Dimana masyarakat saling mendukung dalam segala hal yang tercermin dalam kehidupan sehari-hari. Rasa gotong royong dan kekeluargaan Negeri Morella masih kuat. Tempat dimana masyarakat saling membantu dan bekerjasama.

#### *Nilai dan Norma Budaya*

Kegiatan gotong-royong merupakan nilai dan norma budaya pada KUPS Siliwangi dan Tomasiwa dengan pola kerja sama berupa musyawarah yang dilakukan apabila ada program baru ataupun program lama untuk dipertimbangkan serta membagi pengalaman. Kerja kelompok dilakukan melalui refleksi sebelum bekerja sama . Adanya gotong-royong menciptakan norma-norma sosial seperti pemecahan masalah secara bersama. Seringnya berinteraksi bertukar pendapat demi kepentingan bersama, menimbulkan rasa tanggung jawab sebagai anggota dalam kelompok

tani. Setiap kelompok sadar akan tanggung jawabnya, secara tidak langsung termotivasi untuk mengembangkan kelompok taninya tersebut.(Lestari,2011)

Nilai dan norma kebersamaan masih didapatkan pada anggota KUPS di Negeri Morella. Masyarakat tetap kolaborasi dalam gugusan melalui aktivitas pesemaian tanaman dan penanaman pada lahan masing-masing keluarga. Hal tersebut merujuk kekuasaan individu yang ada tetapi kewajiban komunitas tetap dilaksanakan. Sehingga pada akhirnya masyarakat tetap dapat menjalankan penanaman benih pada lahan masing-masing.

### **Dampak Ekonomi**

Dampak ekonomi dengan adanya HD bagi masyarakat di Negeri Morella, khususnya anggota KUPS ialah memberikan kepastian pengelolaan dan pemanfaatan hutan berdasarkan prinsip-prinsip berkelanjutan. Dari sisi perekonomian, kepastian tersebut dapat memajukan harga jual aset yang dikembangkan di lahan hutan yang dikelolanya. penerbitan izin HD, petani diberikan hak untuk bekerja keras tanpa rasa khawatir.

Menurut masyarakat/responden bahwa KUPS selain mencari keuntungan, harus juga dapat memberikan manfaat sosial yang mengembangkan kualitas hidup masyarakat dengan menciptakan lapangan kerja dan modal usaha bagi peningkatan pendapatan. Adanya Hutan desa dan pembentukan LPHD terjadilah ketenagakerjaan (pekerjaan) untuk para petani. Bantuan modal dari LPHD dapat mengembangkan usaha dan lebih banyak lagi tenaga kerja yang dibutuhkan dan mengurangi angka pengangguran. Sehingga diharapkan melalui pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya yang baik dan professional, maka KUPS dapat meningkatkan pendapatan asli desa/Negeri sekaligus menjadi pilar ekonomi desa/Negeri.

Pada HD desa di Negeri Morella terdapat 3 KUPS (KUPS Siliwangi, Tomasila dan Hausihu), yang terdiri dari beberapa anggota keluarga. Kegiatan yang dilakuan KUPS sangat didukung oleh anggota KUPS. Kegiatan yang dilakukan merupakan inisiatif dari masyarakat/responden. Masyarakat memanfaatkan bantuan modal HD untuk berwirausaha dan mereka aktif dalam mengembangkan KUPS. Segala sesuatu terkait dengan program baru HD selalui melibatkan masyarakat didalamnya dan tidak membedakan masyarakat. Jadi keberadaan HD memberikan KUPS peluang usaha/wirausaha.

Fasilitasi akan diberikan oleh LPHD dimana masyarakat/responden akan mendapatkan pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilannya dalam produk yang dipasarkan. Selain itu masyarakat/responden dapat berkreasi dan berinovasi dengan produk yang dipasarkan tersebut. Kapasitas masyarakat berbasis kearifan lokal dipertahankan karena berkaitan dengan kemampuan dan kapasitas masyarakat berulang. Hal ini memberikan pembelajaran bagi peningkatan aktivits perekonomian masyarakat. Kinerja komunitas menjadi indikator penentu



kesinambungan manajemen. Tunjangan keuangan memang penting, namun jumlah dan kemampuan memprthannkannya menentukan keberlanjutann.

Dampak ekonomi yang ditimbulkan kemungkinan besar akan berdampak pada perusahaan swasta yang dikembangkan di dalam kawasan PS dan properti individu diluar kawasan PS. Peningkatan ekonomi secara mandiri melalui komunitas dapat memberikan peluang yang berarti bagi kerja diwilayah kelompok. Implementasi program PS oleh KUPS terkendala situasi Covid-19 selama 3 tahun, dimana masyarakat/responden tidak dapat beraktivitas dengan baik di masa tersebut. Namun ada optimisme dari masyarakat/responden bahwa implementasi program PS dapat dijamin keberlanjutannya karena responden merasakan ada manfaat yang dirasakan serta kelestarian hutan juga dapat dijaga dengan baik.

Berdasarkan penjelasan dampak ekonomi tersebut, maka dampak ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat/responden antara lain : pelatihan manajemen dan memanfaatkan hasil hutan, peningkatan ekonomi secara mandiri, peningkatan usaha ekonomi masyarakat, bantuan alat ekonomi/alat produksi, bantuan modal usaha, menambah pengetahuan dan ketrampilan dalam pemasaran produk, serta peluang usaha/wirausaha, dan kepastian pengelolaan hutan.

### KESIMPULAN

Bentuk Implementasi Program Perhutanan Sosial (PS) dengan rencana pengelolaan Hutan Desa (HD) oleh LPHD di Negeri Morella diantaranya dibentuk KUPS (KUPS Silliwangi, KUPS Toma Siwa, dan KUPS Hausihu) dan LPHD. Bentuk kegiatannya antara lain *Program Agroforestry* lewat penyuluhan dan penanaman bibit (durian, pala, cengkeh, dan lain-lain), perencanaan penyulingan minyak cengkeh, bantuan alat-alat produksi pengolahan sagu serta penjajakan bantuan kerjasama dengan Bank BI untuk kemasan dan pemasaran sagu tumbu.

Dampak sosial ekonomi keberadaan Hutan Desa (HD) di Negeri Morella oleh responden antara lain; Dampak Sosial yaitu dapat membangun kapasitas masyarakat dalam mengelola lahan, pemahaman responden terhadap HD, adanya interaksi sosial, Nilai dan norma budaya (gotong royong, kerjasama, berbagi pengalaman, kebersamaan), Dampak ekonomi yaitu pelatihan manajemen dan memanfaatkan hasil hutan, peningkatan ekonomi secara mandiri, peningkatan usaha ekonomi masyarakat, bantuan alat ekonomi/alat produksi, bantuan modal usaha, menambah pengetahuan dan ketrampilan dalam pemasaran produk, serta peluang usaha/wirausaha, dan kepastian pengelolaan hutan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bagong, Suyanto dan Sutinah. 2006. Metode Penelitian Sosial : Berbagai Alternatif Pendekatan. Kencana. Jakarta
- Kastanya. A, Marthina Tjoa, G. Mardiatmoko, F. Latumahina, Iskar, Hendrik, E. S. Aponno. 2019. Kajian Dampak Perhutanan Sosial Wilayah Maluku Papua. Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (BPSKL), KLHK. Ambon
- Latukau, S.H. 2019. Resiliensi Masyarakat Desa Hutan Terhadap Implementasi Program Perhutanan Sosial Di Dusun Melinani Kecamatan Seram Utara Kabupaten Maluku Tengah. (Skripsi) Tidak dipublikasikan. Fakultas Pertanian, Jurusan Kehutanan, Program Studi Kehutanan. Minat Manajemen Hutan. Universitas Pattimura. Ambon.
- Lestari, E.G. 2011. Peranan Zat Pengatur Tumbuh dalam Perbanyakan Tanaman Melalui Kultur Jaringan. *J. Agro Biogen* 7(1):63-68
- Miles, M.B dan Huberman, A.M. 1992. Analisis Data Kualitatif, Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru (Penerjemah : T.R. Rohidi). Penerbit Universitas Indonesia. Jakarta.
- Peraturan Menteri Kehutanan. 2008. Nomor:P.49/Menhut-II/2008. Tentang Hutan Desa. Jakarta.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/Menhut-II/2016. Tentang Hutan Desa. Jakarta.
- Suhartini. 2009. Peran Konservasi Keanekaragaman Hayati dalam Menunjang Pembangunan yang Berkelanjutan. Prosiding Seminar Nasional Penelitian Pendidikan dan Penerapan MIPA. Yogyakarta: Fakultas MIPA UNY.
- Sugiyono. 2018. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, penerbit Alfabeta, Bandung
- Silaya, Th. 2004. Kajian Pengelolaan Hutan dan Lingkungan oleh Masyarakat Lokal Di Kecamatan Taniwel Kabupaten Seram Bagian Barat. Maluku.
- Witno, Maria, Dicky.S. 2020. Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm) Tandung Billa DI Kelurahan Battang Kota Palopo. *Jurnal Penelitian Kehutanan Bonita*. Vo. 2, No. 2. Hal 35 -42.